

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi NTB Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Pembudidaya Ikan Di Sekotong)

Hasbullah
UIN Mataram, Indonesia
hasbullah@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat pesisir membutuhkan intervensi Pemerintah melalui program pembangunan sesuai dengan kondisi yang ada. Namun demikian pada umumnya program pembangunan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Selain model program yang bersifat cuma-cuma (bantuan murni), pelaksanaannya tidak dibarengi dengan pendampingan, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di masyarakat. Hal ini sudah disadari Pemerintah sehingga perlu dirumuskan sebuah program yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses pembangunan masyarakat bertujuan untuk memulai kegiatan sosial serta memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Pengabdian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penggalan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Proses Pengabdian intensif berlangsung selama hampir 3 bulan dengan melibatkan masyarakat Desa Sekotong Barat yang menerima bantuan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sebagai Pelaksana Bantuan.

Tujuan dari program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dalam mendukung pembangunan Daerah, mengembangkan keragaman kegiatan usaha, dan memperluas kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

Nilai-nilai Islam yang termuat dalam sistem pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir bagi masyarakat Desa Sekotong Barat dalam memberikan pembelajaran bagi kedua belah pihak yakni mengajarkan tentang nilai kebaikan, baik dalam niat maupun perbuatan, harus senantiasa bersifat Adil, Jujur, dan Amanah.

Kata Kunci: *Program Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir, Perspektif Ekonomi Islam.*

ABSTRACT

Coastal communities needed government intervention through the development of programs in accordance with the existing conditions. However, the programs commonly provided to communities were not in accordance with the conditions. In addition to the program model at no charge (pure assistance), its implementation was not accompanied by assistance resulting in different perceptions among the communities. The Government has realized that it was necessary to formulate a program like community empowerment. Community empowerment is a

development process aimed to initiate social activities and to improve one's own situation and condition. This qualitative with field research design gathered data from observation, in-depth interviews, and documentation. The research intensively lasted for almost 3 months, involving West Sekotong people who received assistance from the Coastal Community Economic Empowerment program and the Marine and Fisheries Agency of NTB as the supporting Implementer. The objectives of this Empowerment program were to increase community participation in planning, implementing, monitoring, and developing economic activities, strengthening economic institutions in supporting regional development, developing a variety of business activities, and expanding job opportunities to increase people's incomes. The Islamic values in the implementation system of this program for the communities in providing learning for both parties were teaching the value of goodness, both in intentions and actions, always being fair, honest, and trustworthy.

Keywords: *Empowerment Program, Coastal Communities, Islamic Economic Perspective.*

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Provinsi kepulauan yang memiliki potensi dan prospek sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang cukup besar. Dengan luas perairan laut sebesar 29.159,04 km² (59,13%) yang lebih luas dari wilayah daratannya yang sebesar 20.153,15 km² (40,87%). Jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 278 Pulau dan panjang pantai sekitar 2.333 Km. Potensi sumberdaya perikanan tangkap di laut sebesar 185.158,5 Ton dengan komoditas ikan tuna, tongkol, cakalang. Selain itu. Provinsi NTB mempunyai ekosistem perairan yang terbilang lengkap seperti perairan laut pelagis, laut demersal, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang kaya akan terumbu karang, padang lamun, mangrove hingga perairan umum seperti waduk, danau, sungai dan embung. Dibidang perikanan budidaya Provinsi NTB memiliki potensi areal budidaya laut sebesar 57.245,98 Ha, budidaya air payau seluas 26.287,5 Ha dan areal air tawar 5.108,8 Ha.¹

Besarnya potensi perikanan tidak diikuti oleh kesejahteraan masyarakat nelayan. Problem yang terlihat pada kondisi sosial ekonomi nelayan kita sangat jauh berbeda dengan potensi sumberdaya alamnya. Dalam kenyataannya kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan) dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain.

Hakikatnya masyarakat nelayan identik dengan masyarakat yang miskin, hal ini disebabkan oleh dua faktor utama yakni faktor alamiah dan non alamiah. Faktor alamiah disebabkan karena fluktuasi musim tangkap ikan dan struktur alamiah sumberdaya ekonomi Desa. Sementara faktor non alamiah berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan ikan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak terdapat jaminan sosial tenaga kerja, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran hasil

¹ Tim Penyusun Profil Desa, *Profil Desa Sekotong Barat*, Tahun 2014, 4

tangkapan dan belum berfungsinya koperasi nelayan yang ada.²

Islam berkembang melalui pesisir. Demikian pula munculnya kekuatan Islam dan skala besar juga datang dari pesisir. Sebab, pesisir adalah daerah pertemuan berbagai kebudayaan atau tradisi dari berbagai bangsa, suku, ras, dan agama. Hal inilah yang menyebabkan orang pesisir bersifat lebih terbuka dan mudah menerima perubahan.³ Kondisi masyarakat pesisir, yang sebagaimana telah disebutkan di atas, perlu intervensi pemerintah melalui program pembangunan sesuai dengan kondisi yang ada. Namun demikian pada umumnya program pembangunan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Selain model program yang bersifat cuma-cuma (bantuan murni), pelaksanaannya tidak dibarengi dengan pendampingan; sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dimasyarakat. Hal ini sudah disadari pemerintah sehingga perlu dirumuskan sebuah program bersifat pemberdayaan masyarakat (*Community development*).

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk memulai proses kegiatan sosial serta memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.⁴ Konsep pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh Masyarakat. Dalam konteks ini, secara implisit pemberdayaan mengandung unsur partisipasi yang seharusnya dimunculkan dari dalam diri masyarakat itu sendiri,⁵ baik itu partisipasi yang dapat terwujud dalam dimensi ekonomi (efisien serta layak), dimensi sosial (berkeadilan) dan dimensi ekologis (ramah lingkungan).⁶

Pemberdayaan masyarakat pesisir tidak seperti memberdayakan kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam kosmologi masyarakat pesisir dapat ditemukan dua pola kelompok kehidupan masyarakat yakni masyarakat nelayan tangkap dan masyarakat nelayan pengumpul atau bakul, kedua kelompok masyarakat ini pada tarap hidup dan kebiasaannya memiliki kehasan yang menunjukkan suatu identitas atas kelompok mereka.⁷ Program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat nelayan haruslah bersifat *bottom up* dan *open menu*, tetapi yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran.⁸

² Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Jakarta: LKIS, 2006), h. 23

³ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), 105.

⁴ James A. Christenson dan Jerry W. Robinson, Jr Ames. *Community Development In Perspective*: (Amerika: Iowa State University Pres, 1989), 215

⁵ S. Usman. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 3

⁶ Iin Indarti dan Dwiyadi Surya Wardana, Metode pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan di Wilayah Pesisir Kota Semarang, (BENEFIT: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 17 Nomer 1 – Juni 2013), 75.

⁷ Lebih jelasnya lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

⁸ Didin S., Damanhuru, *Tinjauan Kritis Ideologi Liberalisme dan Sosialisme*, (Badan Pendidikan dan Pelatihan Departement Dalam Negeri, Jakarta, 1997), 95.

Salah satu bentuk ikhtiar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir adalah dengan menerapkan salah satu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)⁹ merupakan salah satu konsep program Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak Tahun 2001 yang dirancang secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong dinamika pembangunan sosial ekonomi di kawasan pesisir. Dengan demikian pendekatan utama Program PEMP adalah kelembagaan.

Secara khusus, tujuan dari program PEMP adalah: (1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat; (2) Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dalam mendukung pembangunan Daerah; (3) Mengembangkan keragaman kegiatan usaha, dan memperluas kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

Berdasarkan observasi awal peneliti, menunjukkan bahwa salah satu bentuk implementasi program PEMP yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB untuk masyarakat pesisir di Sekotong adalah dalam bentuk pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya tiram mutiara dan budidaya ikan laut dengan sistem Karamba Jaring Apung (KJA) yang secara kuantitatif mengalami peningkatan. Dimana setelah adanya PEMP, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budidaya tiram mutiara dan budidaya ikan laut meningkat, sedangkan dari sisi kelembagaan dan keswadayaan masyarakat menunjukkan semakin menguat dengan terbentuknya kelompok dan kegiatan pengembangan usaha budidaya.¹⁰

Implementasi program dengan Karamba Jaring Apung (KJA) tersebut telah meningkatkan hasil panen nelayan, sebagaimana data hasil panen/produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 sebesar 1.089.317 ton, meningkat 65.233 ton dari tahun sebelumnya yakni tahun 2018 sebesar 1.024.084 hal ini dapat diasumsikan bahwa seiring peningkatan hasil produksi tersebut tentunya juga akan diiringi dengan adanya peningkatan pendapatan nelayan pembudidaya ikan.

Secara psikologis, masyarakat nelayan tergolong masyarakat yang cepat puas dengan apa yang diperolehnya. Selain itu, sebagian masyarakat nelayan menganggap bantuan pemerintah berupa hibah dengan jenis apapun, tidak perlu dikembalikan. Akibatnya penggunaan dana bantuan kurang optimal, sehingga bantuan dari program PEMP yang telah diterima tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan dan kemandirian dalam menunjang keberhasilan dari program yang telah diterima dari

⁹ Yang selanjutnya jika merujuk pada penyebutan istilah program hanya akan menuliskan singkatan Program PEMP saja; hal ini ditujukan untuk memudahkan dalam penggambaran dan konsistensi penulisan.

¹⁰ Lihat data statistik peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dan peningkatan jumlah pendapatan pada masyarakat pada sektor perikanan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020. <https://bit.ly/2OjFy0c>, akses 31 Maret 2021, Jam, 21.30 Wita.

pemerintah. Secara teorinya program pemberdayaan direalisasi untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan mampu bertanggung jawab atas program ini, akan tetapi secara realita masih banyak ditemukan penerima manfaat dari program ini yang tidak tepat sasaran, sehingga bantuan yang telah di berikan tidak dimanfaatkan secara mestinya dan sudah bertentangan dengan nilai-nilai islam seperti halnya tentang keadilan dalam aktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai.

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah), Tidak mengakomodir salah satu hak diatas dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman.¹¹ Pembahasan keadilan perlu diperhatikan bagi pelaku ekonomi dalam melakukan setiap kegiatan dalam mencapai

tujuan yang sesuai dengan rencana kerja, seperti pada pelaksanaan program PEMP oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB haruslah didasari dengan sikap yang adil dan amanah baik dalam proses realisasi bantuan yang akan di serahkan kepada kelompok penerima manfaat.

Berdasarkan hasil observasi, salah satu yang menjadi kemiskinan nelayan sulit dihapuskan adalah karena gagalnya program pemberdayaan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh faktor diantaranya terkait sumber daya manusia. Umumnya masyarakat pesisir wilayah Sekotong yang menjadi sasaran program PEMP oleh Dinas Kelautan dan Perikanan masih tergolong masyarakat dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang rendah. Hal ini menjadikan masyarakat nelayan hanya memikirkan langkah untuk menjaga kelangsungan hidup hari ini dan tidak bekerja secara amanah dalam menerima bantuan padahal secara teori syariat Islam mengajarkan bahwa dalam berwirausaha hidupakan mata hati untuk menegakkan sikap amanah. Karena dalam sikap amanah juga akan menjaga hak-hak Allah dan hak- hak manusia sehingga ia tidak akan lalai dalam menjaga kewajibannya.¹³

Salah satu kewajiban kelompok penerima manfaat dari Program ini yaitu melaporkan kegiatan budidayanya di lokasi secara administratif kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB namun pada kenyataanya kelompok penerima manfaat tersebut masih ada yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan ini membuktikan adanya kesenjangan antara teori dan fakta yang terjadi, sehingga hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan Pengabdian lebih mendalam yang difokuskan pada, bagaimana program tersebut dilaksanakan dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.

METODE PENERAPAN

Dalam Pengabdian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan secara

¹¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengganas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 15.

kualitatif ini penulis pilih agar dapat memperoleh keterangan-keterangan yang luas dan mendalam mengenai pelaksanaan Program PEMP yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB di Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Menurut Lexy J. Moleong, Pengabdian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode.¹²

Pengabdian ini berlokasi di Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Pengabdian ini merupakan salah satu kegiatan Pengabdian yang dapat membantu Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dan masyarakat pesisir dalam memahami pelaksanaan Program PEMP. Selain itu juga lokasi Pengabdian ini sangat memungkinkan peneliti untuk melakukan Pengabdian terkait pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

PEMBAHASAN

Sistem Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pemp)

Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dijalankan dengan berbagai tahap, yakni:¹³

Tahap Perencanaan.

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebelum melaksanakan suatu kegiatan program, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan harapan yang ditetapkan. Perencanaan Program PEMP mencakup kegiatan: pemilihan lokasi desa pantai penerima manfaat kegiatan dan pemilihan lembaga fasilitator daerah. Pada tahap perencanaan ini, semua *timwork* yang telah ditunjuk melakukan permusyawaratan dan pembahasan yang mencakup empat persoalan pokok yakni;

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan;
- 2) Merumuskan keadaan sekarang/saat ini;
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi; dan yang terakhir,
- 4) Mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

Tahap Pemilihan Lokasi

Lokasi penerima manfaat kegiatan Program PEMP dipilih meliputi kriteria pemilihan desa penerima program. Berdasarkan kriteria, sebagai berikut:

- 1) Desa yang memiliki pantai

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

¹³ Wawancara baik Yuli Hidayati, Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTB, padatangal 26 Oktober 2021 pukul 09.50 wib

- 2) Desa yang memiliki nelayan miskin lebih banyak dibandingkan dengan Desa lain yang memiliki potensi sumberdaya laut dan pesisir yang sudah dikembangkan. Ada ketergantungan ekonomi masyarakat setempat yang sangat besar terhadap sumberdaya pesisir dan laut.

Tahap Sosialisasi Program PEMP¹⁴

Pengertian sosialisasi dalam program adalah proses memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* tentang program PEMP. Tujuan sosialisasi ini adalah agar masyarakat dan *stakeholder* memahami program PEMP mengenai apa latar belakang dan tujuan program, hasil apa yang ingin dicapai, manfaat apa yang didapat oleh masyarakat dan *stakeholder*, dan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sosialisasi adalah masyarakat dan *stakeholder* dapat memahami secara utuh program PEMP tentang konsep, prinsip, pendekatan, dan prosedur pelaksanaan program PEMP. Dengan meningkatnya pemahaman secara utuh terhadap program PEMP, diharapkan masyarakat dan *stakeholder* akan termotivasi untuk mendukung program tersebut. Untuk itu, maka proses sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal pelaksanaan program saja tetapi berlangsung secara terus menerus sampai pada akhir pelaksanaan program. Sosialisasi program PEMP dilakukan pada setiap tingkatan pengelolaan di daerah yaitu di kabupaten, kawasan, dan desa pesisir. Penjelasan dari pelaksanaan sosialisasi pada setiap tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi program PEMP di Kabupaten bertujuan untuk memberikan penjelasan dan informasi tentang program PEMP kepada Pokja-Kab, instansi terkait, lembaga lokal, Camat, PjOK dan pihak yang berkepentingan mengenai berbagai hal berkaitan dengan Program PEMP
- 2) Sosialisasi Program PEMP di Kawasan pesisir. Sosialisasi tingkat kawasan diselenggarakan di kecamatan atau salah satu kecamatan program PEMP melalui Forum Perencanaan Kawasan. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh penanggungjawab operasional program tingkat kecamatan (PjOK) dibantu dan Fasilitator Kabupaten, dan dihadiri oleh Camat, PjAK, UPK, Kepala Desa dan wakil masyarakat pesisir dari masing-masing desa pantai penerima manfaat program. Pertemuan sosialisasi ini menjelaskan tentang tujuan, prinsip, kebijakan, dan mekanisme pengelolaan program PEMP. Hasil yang diharapkan dalam sosialisasi tingkat kawasan adalah: 1). Publikasi atau sosialisasi kepada peserta tentang informasi program meliputi tujuan, prinsip, pendekatan, organisasi, pendanaan, proses dan prosedur yang dilakukan; 2). Terinformasinya rencana program atau proyek dari kabupaten yang benar-benar dilaksanakan di kawasan pesisir.
- 3) Sosialisasi Program PEMP di Desa. Sosialisasi program di desa bertujuan untuk menjelaskan tujuan, prinsip dan mekanisme pelaksanaan Program masyarakat desa. Sosialisasi ini dilakukan dalam Forum Perencanaan Desa dilaksanakan setelah

¹⁴ Wawancara Baiq Yuli Hidayati, Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTB, padatanggal 26 Oktober 2021 pukul 09.45 wib

sosialisasi di kawasan. Desa diselenggarakan kepala desa. Forum ini dihadiri oleh aparat desa, tokoh masyarakat pesisir, dan organisasi masyarakat lokal di tingkat desa, serta calon Penerima manfaat. Hasil diharapkan dalam sosialisasi di Desa adalah tersebar luasnya informasi program PEMP meliputi konsep, tujuan, manfaat, prinsip pendekatan, struktur organisasi, mekanisme pendanaan, serta proses dan prosedur kegiatan dilakukan.

Tahap Pelatihan

Pelatihan merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan program PEMP. Pada setiap tahapan pelaksanaan program akan terjadi proses transfer pengetahuan dan ketrampilan diantara pengelola program masyarakat pembelajaran. Pelatihan program menggunakan pembelajaran dengan metode yang partisipatif. Adapun peserta dalam pelatihan ini adalah seluruh kelompok penerima sasaran yang telah ditetapkan pada tahapan-tahapan sebelumnya.

a. Tahap Realisasi.

Setelah penerima manfaat terlatih, maka proses selanjutnya adalah setiap kelompok terpilih menerima dana bantuan PEMP baik dalam bentuk uang maupun peralatan tergantung pada sasaran program. Sehingga dari dua kelompok yang menjadi sample Pengabdian ini ditemukan bahwa Harapan baru mendapatkan bantuan berupa alat tangkap ikan, sedangkan untuk kelompok mutiara baru mendapatkan bantuan berupa bibit dan biaya pemeliharaan (pakan dan obat-obatan).

b. Tahap Pendampingan dan Monitoring.

Dalam rangka memastikan ketercapaian tujuan dan saran program, maka proses pendampingan dan monitoring dilakukan secara berkala. Salah satu indikatornya adalah semakin meningkatnya alokasi anggaran pembangunan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setiap tahun. Keberpihakan serta dukungan yang diberikan kepada KKP ini merupakan suatu amanah yang harus diikuti dengan akuntabilitas yang tinggi, baik oleh para aparatur dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun dalam pengelolaan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah. Mengingat hal tersebut dalam penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan sehingga output dan outcomenya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Tujuan monitoring ini dilakukan untuk mewujudkan keinginan dan tuntutan tersebut, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka upaya melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di lingkungan KKP merupakan suatu kebutuhan dan upaya strategis yang sangat menentukan keberhasilan program/kegiatan secara efisien dan efektif. Selain melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan secara umum, juga dilakukan

pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis KKP.

Kontektualisasi Nilai Islam dalam Sistem Pemberdayaan Masyarakat Sekotong.

Secara konsep, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir tersebut, mengandung lima konsep utama yang memiliki keterikatan nilai dengan konsep pengembangan masyarakat islam, yakni:¹⁵

- c. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial dimana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi.
- d. Pemberdayaan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki.
- e. Pemberdayaan masyarakat mesti dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya.
- f. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekadar diartikan sebagai kehadiran tetapi kontribusi tahapan yang mesti dilalui oleh suatu dalam program kerja pemberdayaan masyarakat
- g. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup.

Kelima prinsip turunan tersebut sebenarnya merupakan cerminan aktualisasi nilai Islam dalam memberikan pandangan hidup sehingga menuju tatanan kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Kunci keberhasilan tersebut yakni penyatuan antara dimensi material dan spritual dalam kehidupan sosial. Sehingga hal tersebut perlu dilihat lebih lanjut dengan melakukan pengelompokan atas prinsip pemberdayaan atau pengembangan masyarakat yang bermuara pada tigamatra kehidupan.

a. Lingkungan Individu

Pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat pesisir Sekotong pada lingkup individu pada masa usia sekolah dipandang penting karena pondasi awal untuk mewujudkan keberdayaan dalam lingkup kolektif. Pemberdayaan masyarakat dalam level individu di Sekotong memang tidak dapat terlepas dari bagaimana kacamata Islam dalam memandang keadilan, kebebasan, persamaan dan keluhuran manusia. Proses pendidikan yang menyatukan dimensi agama dan pendidikan di Sekotong tidak hanya berlangsung di dalam ruangan, namun juga dalam suatu sistem dan tata kerja

¹⁵ Supriyanti Istiqomah, Istiqomah,. (2008) Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam. Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. (Online), Volume 4, Nomor 1, Juni, 65-78. <http://iain.lampung.ac.id/> Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Akses, 28 November 2021, 14.67 wita.

dalam mencukupi hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam juga merupakan proses pengmabangan individudalam pendidikan secara umum.

b. Lingkungan Keluarga

Pembangunan *civil society* atau masyarakat madani di lingkungan masyarakat pesisir yang mempunyai kebanggaannya berharap terbentuknya keluarga bermartabat karena pada hakikatnya dimana tempat berpijak kebaikan dapat selalu dibangun pula. Sebab keluarga masyarakat pesisir khususnya Sekotong memang masih dipandang tergolong kategori terbelakang berdasar kajian Badan Pusat Statistik dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melihat tersebut sudah saatnya diperlukan suatu penguatan-penguatan yang tepat.

Pendekatan ini menekankan pentingnya merangsang anggota masyarakat(keluarga) untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya sendiri dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memecahkan permasalahan mereka. Pendekatan ini mendidik wargamasyarakat menjadi lebih peduli terhadap kegiatan aktif memecahkan masalah yang mereka hadapi dengan memberdayakan potensi yang telah dimiliki.

Dalam kacamata Islam seseorang apalagi menjadi pimpinan harus memiliki konsep *qudwah hasanah* yaitu tauladan yang baik. Dan dalam memimpin keluarga, Rasulullah Muhammad SAW memang telah memberikan suatu pernyataan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang baik dengan keluarganya dan Akulah (Rasul) yang orang terbaik dalam membina keluarga. Bilamana dianalogikan suatu tatanan bangunan, yaitu keluarga. Bangunan keluarga akan ideal dengan berdiri kokoh bi-lamana material yang tersedia yaitu individu berkualitas untuk kemudian ditempelkan melalui perekat tepat yaitu nilai-nilai agama. Pondasi kehidupan keluarga adalah agama yang disertai kesiapan fisik dan mental anggotanya. Keluarga merupakan umat kecil yang memiliki pemimpin dan anggota, mempunyai pembagian tugas kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Jika pembinaan individu-individu dalam keluarga diarahkan kepada pembinaan dan pemberdayaan yang memiliki kecerdasan rohaniah dan kecerdasan intelektualitas maka keluarga semakin mudah mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

c. Lingkup Masyarakat

Sebagai daerah ujung barat provinsi NTB, masyarakat Sekotong berupaya bangkit memberdayakan kehidupannya menuju kesejahteraan dengan mengerahkan segala potensi dan sumber daya di berbagai sektor. Inisiatif terjadi saat kesatuan tujuan masyarakat terbentuk. konteks administrasi publik dan pembangunan, mengacu pada fungsi dari hadirnya suatu perubahan dalam negara mengharuskan pelibatan aktif dari masyarakat. Sehingga suatu kerjasama harus ditumbuh kembangkan antara negara dan masyarakat sesuai dengan porsi masing-masing.

Keberadaan kelompok pembudidaya ikan tentunya akan memberikan pengaruh tidak langsung maupun langsung bagi perbaikan lingkungan masyarakat. Melalui kelembagaan ini terbentuk kelompok-kelompok sosial yang berfungsi sebagai basis dan

subjek pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pesisir yang berbasis kelembagaan akan berfungsi optimal untuk pengorganisasian warga dan pengelolaan kemampuan sumber daya sosial ekonomi lokal serta memanfaatkannya secara efektif dan efisien sehingga mempermudah pencapaian tujuan pemberdayaan. Oleh karena itu, setiap pemberdayaan masyarakat pesisir dituntut untuk mengidentifikasi secara cermat eksistensi pranata atau kelembagaan sosial budaya lokal yang benar-benar berperan dalam kehidupan masyarakat pesisir.

Pada tataran inilah bauran dimensi ilmu dan amal dapat terjawantahkan sebagai satu bentuk aktualisasi pola keberdayaan masyarakat internal dan juga menjadi daerah pembinaan secara swadaya bagi masyarakat di luar Sekotong merupakan terapan dalam dua dimensi tersebut. Sedangkan arah pemberdayaan dalam perspektif ini melalui ilmu pengetahuan sebagai kesadaran mendalami Sunattullah menuju penguatan keimanan, amal (mengajarkan ilmu Allah) Sebagai pedoman hidup kemasyarakatan melalui kewajiban dakwah, menyebarluaskan ajaran Allah SWT kepada manusia lainnya.

Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam tinjauan Pemberdayaan Islami

Adapun kondisi masyarakat Sekotong memang plural adanya. Keberadaan umat Hindu yang memang minoritas tetap hidup aman bahkan keterlibatan aktif umat non muslim tersebut menunjukkan sikap kooperatif. Salah satu contoh, anak-anak mereka yang disekolahkan atau dititipkan di TK, PAUD dan Rumah Pintar. Selain itu, pembagian bantuan sosial semacam daging qurban dan baju layak pakai juga menyertakan warga non muslim. Hal ini dapat dikaji dari sisi Islam dalam mengajarkan akhlak. Sikap toleransi bahkan memberikan kebebasan bagi pemeluk agama lain untuk melaksanakan keyakinannya adalah tauladan yang baik. Artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam konteks keberdayaan masyarakat muslim memang ada sisi akhlak yang mesti diberikan penguatan, di mana Qardawi¹⁶ yang memberikan pandangan bahwa selain keistimewaan Islam dalam bidang akidah; ibadah dan pola pikir, masyarakat Islam juga memiliki keunggulan dalam masalah akhlak dan perilaku. Eksistensi masyarakat Islam terletak pada persamaan dan keadilan, kebajikan dan kasih sayang, kejujuran dan kepercayaan, sabar dan kesetiaan, rasa malu dan harga diri, kewibawaan dan kerendahan hati, kedermawanan dan keberanian, perjuangan dan pengorbanan, kebersihan dan keindahan, kesederhanaan dan keseimbangan, kepemaafan dan kepenyantunan, serta saling menasehati dan bekerja sama. Secara konsep dasar akhlak tergambar dalam Al Qur'an¹⁷ yang mengumpulkan antara akhlak *rabaniyah* (misal: takut pada Allah dan hari pembalasan) dan akhlak *insaniyah* (misal: menepati janji, shilaturahim, berinfak) dimana bila direnungkan bermuara pada sifat rabaniyah.

Prinsip Islam dalam membentuk dan mengembangkan masyarakat pada matra

¹⁶ Yusuf Qardawi, Masyarakat Berbasis Syariat Islam II/ Yusuf Qardawi; penerjemah, Abdul Salam Masykur; editor, Ratna Susanti. (Surakarta, Era Intermedia, 2003), 147-148

¹⁷ Baca Al-Qur'an Surat Ar-Raad, Ayat 19-22.

intelektual.

Masyarakat Sekotong dapat disebut masyarakat yang memang memiliki kemauan berdaya. Pondasi yang dibangun salah satunya adalah pendidikan. Pada tataran ini masyarakat Sekotong secara sukarela mau dan dapat menerima pola penangkapan ikan dan bergeser dari mitos dan kepercayaan lokal yang disatupadankan dengan teknologi dan teknis perikanan yang lebih baik. Mereka tidak kekeh dan memberikan keterbukaan diri terhadap nilai baru dan teknologi baru dalam poses kerja sebagai nelayan tangkap kemudian juga sebagai nelayan pembudidaya sektor perikanan dan kelautan lainnya.

Prinsip Islam dalam membentuk dan mengembangkan masyarakat pada matra ekonomi.

Sebagai wilayah pesisir sebenarnya banyak potensi yang dapat ditumbuh-kembangkan menjadi andalan topangan ekonomi bagi masyarakat. Pada umumnya masyarakat bertani dan *ngrau*,¹⁸ ada juga yang buruh nelayan dan tambak, usaha dagang dan jasa selebihnya memang menjadi TKI ke luar negeri. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program PEMP ada muncul gagasan untuk melakukan suatu kewirausahaan melibatkan seluruh masyarakat Sekotong selaku anggotanya. Secara detail berbagai upaya-upaya kewirausahaan yang pernah dilakukan belum bertahan optimal sampai sekarang. Hal ini memang diperlukan beragam cara dalam mencari solusi ketidakberdayaan masyarakat Islam yang berwujud kemiskinan dan patologi lainnya selalu bermuara pada dimensi ekonomi. Pembangunan matra ekonomi didasari dua sifat utama yaitu (1) tegas bahkan kaku dan (2) luas, luwes, dinamis, terinci.

Dampak Program PEMP Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Sekotong.

Salah satu aset yang paling berharga adalah modal sosial yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu dalam suatu wilayah, termasuk masyarakat pesisir Sekotong. Sumberdaya manusia terbentuk melalui potensi kelompok dengan melakukan hubungannya baik berdasarkan pada jaringan sosial, norma, nilai dan kepercayaan menjadikan sebuah masyarakat memiliki potensi untuk maju dan berkembang. Hal ini sesuai dengan definisi modal sosial menurut Usman¹⁹ yaitu sumberdaya yang muncul dari hasil interaksi dalam suatu komunitas, baik antar individu maupun institusi yang melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan, hubungan-hubungan timbal balik, dan jaringan-jaringan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk struktur masyarakat yang berguna untuk koordinasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Modal sosial dalam ekonomi dapat meningkatkan kekuatan pelaku-pelaku yang ada selain itu dapat meningkatkan efisiensi di dalam perekonomian. Modal – modal sosial seperti nilai dan norma, jaringan, kepercayaan, timbal balik, informasi dan kelompok dalam suatu komunitas dapat menjadikan anggota di dalamnya lebih berdaya dalam memperoleh manfaat pemberdayaan. Namun demikian, tentu saja hal tersebut akan terwujud dengan adanya unsur-unsur motivasi yang dapat mengarahkan mereka pada penerapan kerja

¹⁸ Adalah istilah umum masyarakat Sasak bagi sekelompok atau individu masyarakat yang bertani di daerah perbukitan.

¹⁹ Usman, S. 1995. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

kelompok yang lebih baik dan konkrit. Salah satu diantaranya adalah hadirnya program-program pemberdayaan masyarakat yang biasanya dikucurkan oleh pemerintah. Harapannya adalah melalui pemberdayaan masyarakat maka modal sosial akan terpakai. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Gold et al dalam Mattana (2006) bahwa secara etimologis modal sosial memiliki pengertian modal yang dimiliki masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.¹²¹²⁰

Berdasarkan hasil analisis data, didapati bahwa modal sosial yang tumbuh di dalam kehidupan masyarakat pesisir ternyata dipengaruhi oleh program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Artinya, modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat menjadi semakin baik dengan hadirnya program pemberdayaan yang disebut dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dikucurkan oleh Pemerintah di Sekotong. Adapun bentuk bantuan tersebut diantaranya:

- a. Pemberian Bibit ikan dan Tiram mutiara
- b. Pengenalan teknologi pengolahan garam
- c. Pemberian bantuan alat tangkap ikan
- d. Pembentukan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan yang terampil.

Sasaran dari program PEMP adalah masyarakat pesisir, yang tergolong skala mikro dan kecil, yang berusaha sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan, pengolah ikan, pengusaha jasa perikanan, dan pengelola pariwisata bahari serta usaha/kegiatan lainnya yang terkait derigan kelautan dan perikanan seperti pengadaan bahan dan alat tangkap, pemberian benih bagi nelayan pembudidaya ikan dan hasil laut lainnya.

Walaupun demikian, dari uraian-uraian diatas menggambarkan bahwa secara keseluruhan hadirnya keempat usaha dari program PEMP di tengah-tengah masyarakat pesisir (nelayan) telah memberikan motivasi kerja bagi usaha mereka, yaitu semakin meningkatkan semangat di dalam bekerja sehingga disini nampak indikasi bahwa telah terjadi peningkatan modal sosial akibat dari terlaksananya program PEMP di Wilayah pesisir Sekotong bahwa semangat kerja yang secara implisit merupakan implikasi dari modal sosial secara umum dapat berkembang dengan hadirnya pemberdayaan masyarakat. Ibarat potensi kerja produktif yang lama tersimpan, bangkit kembali oleh rangsangan-rangsangan (motivasi).

Realitasnya PEMP yang dikucurkan oleh pemerintah memiliki daya rangsang atau motivasi yang cukup kuat untuk membangkitkan kembali semangat kerja produktif dari para nelayan yang semula memang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, jika diamati secara parsial pengaruh PEMP terhadap peningkatan modal sosial yang tumbuh pada masyarakat pesisir

²⁰ Andreas, & Enni Savitri. *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti Dan Rokan Hilir* (Riau: Universitas Riau, 2015),80

berdasarkan indikator refleksi dari pemberdayaan dapat diketahui bahwa keterpengaruhannya terlihat pada dimensi kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*network*). Hal tersebut memungkinkan untuk terjadi bila melihat kenyataan pada era otonomi daerah ini partisipasi masyarakat menjadi unsur penting keberhasilan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah maupun di tingkat desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Madekhan Ali, bahwa Otonomi Desa adalah kemandirian pemerintahan dan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi, merencanakan kegiatan, menggali dana, mendanai pembangunan, dan mengontrol kegiatan pembangunan Desa.²¹ Karena itu keberadaan modal sosial didalam masyarakat harus didayagunakan dan dioptimalkan. Karena sesungguhnya ada modal sosial yang telah melekat dalam diri masyarakat desa yang terpendam dan belum diberdayakan dengan maksimal karena pengarus desentralisasi sistem pemerintahan dan struktur sosial.

Wujud kedua dalam pelaksanaan program PEMP di Sekotong adalah dengan pemberian bantuan alat tangkap ikan, meski pada dasarnya setiap warga dan masyarakat pesisir (nelayan) telah memiliki fasilitas penunjang usaha, seperti kapal (motor atau perahu), jaring atau pukat, alat pancing dan sebagainya, namun kenyataannya di dalam melakukan usaha penangkapan kendala yang sangat dirasakan adalah kurangnya modal usaha dan pemanfaatan teknologi. Sebagian besar bahkan hampir seluruh nelayan responden di dalam melakukan usaha penangkapan ikan dan hasil laut lainnya memiliki modal yang sangat minim. Hal ini secara langsung ataupun tidak langsung dapat berakibat pada rendahnya hasil penangkapan (produksi). Pengaruh langsungnya adalah berkaitan dengan biaya variabel (*variable cost*) yang dikeluarkan, seperti: pembelian BBM, upah tenaga kerja, ransum dan lain-lain. Di samping itu, kapal (motor atau perahu), jaring atau pukat, alat pancing dan perlengkapan alat tangkap lainnya sebagai modal tetap dari pembiayaan awal melakukan usaha disinyalir masih belum memadai jika diukur berdasarkan rasio antara jumlah modal tetap dan besarnya potensi hasil laut yang bisa diperoleh. Keadaan seperti ini ternyata dapat berpengaruh pada etos kerja nelayan yang semula baik, sebab juga berkaitan dengan keharusan melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka menjadi menurun.

Dampak Program PEMP Terhadap Ekonomi Masyarakat Masyarakat Sekotong

Persoalan utama tidak berkembangnya usaha perikanan di Sekotong adalah terbatasnya permodalan dan pemasaran. Masyarakat nelayan kesulitan untuk mendapat permodalan untuk mengembangkan usahanya, karena tidak memiliki agunan untuk meminjam dari lembaga keuangan. Apalagi para pengelola lembaga keuangan masih beranggapan usaha dibidang perikanan memiliki resiko yang tinggi dan khawatir dana pinjamannya tidak kembali. Untuk aspek pemasaran, seluruh nelayan Sekotong secara

²¹ Ali Madekhan, *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*, (Yogyakarta: Averroes Press, 2007), 97

husus dan Nelayan Lombok Barat secara umum mengeluhkan sulitnya pemasaran karena TPI Pelangan yang ada tidak berfungsi. Oleh karena itu, hasil tangkapan nelayan dijual kepada pedagang pengumpul (*penendak*).

Harga ikan ditentukan oleh penebak dan harga untuk ikan pelagis dipukul rata sama Rp 6000,- per kg dan ikan karang antara Rp 15.000,- hingga Rp30.000,- per kg. Padahal harga komoditi ikan di pasar lokal berbeda-beda untuk setiap jenisnya. Kondisi harga ikan yang rendah ini harus diterima nelayan dan seolah telah mentradisi bagi mereka. Kondisi ini menyebabkan pendapatan nelayan menjadi rendah dan terus terbelenggu dalam lingkaran kemiskinan.

Dari sisi pendapatan, sebelum program PEMP pendapatan tertinggi diperoleh pedagang ikan dan terendah diperoleh nelayan. Hal ini disebabkan pedagang ikan lebih memiliki nilai tawar yang tinggi dibanding nelayan karena pedagang ikan yang dominan menentukan harga. Bahkan pada saat hasil tangkapan ikan melimpah, pedagang pengumpul tidak selalu bersedia membeli ikan tersebut. Selain itu, hampir sebagian besar nelayan sangat tergantung terhadap pedagang ikan terutama untuk kebutuhan operasi melaut seperti biaya perbekalan, umpan dan BBM, semua kebutuhan tersebut difasilitasi pedagang ikan sebagai pinjaman. Hubungan ini sudah terjalin lama dan sudah menjadi tradisi dalam bentuk *patron client*.

Setelah Program PEMP, pendapatan nelayan mengalami peningkatan yang sangat signifikan antara 100-288%, sedangkan pedagang ikan sebesar 42% dan pembudidaya ikan sebesar 18%. Berdasarkan analisis uji *Wilcoxon signed rank test* pada taraf kesalahan $< 5\%$, menunjukkan bahwa program PEMP secara nyata berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan nelayan *gillnet*, nelayan pajeko, dan pedagang ikan di Sekotong. Hal ini menunjukkan program PEMP berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan nelayan dan pedagang ikan penerima program di Sekotong. Kenaikan pendapatan yang tinggi pada nelayan *gillnet* ini disebabkan terjadi peningkatan produksi dari 6 kg/trip (sebelum program) menjadi 18 kg/trip (setelah program) dan peningkatan upaya tangkap dari 20 trip/bulan (sebelum program) menjadi 22 trip/bulan (setelah program).

Kondisi ini mungkin terjadi sebagai dampak lompatan teknologi (*frogging*) unit penangkapan ikan, yaitu yang semula nelayan hanya menggunakan alat tangkap pancing ulur dan perahu dayung/layar berubah menjadi nelayan yang menggunakan alat tangkap *gillnet* dan perahu ketinting bermesin 5,5 PK.

Untuk kenaikan pendapatan nelayan setelah program PEMP, bukan disebabkan peningkatan produksi penangkapan tetapi lebih dikarenakan berubahnya status nelayan dari buruh menjadi pemilik kapal. Sebelum Program PEMP, sistem bagi hasil yaitu dari laba bersih dibagi rumpon sebesar 25%, pemilik kapal sebesar 35,7% dan ABK sebesar 37,5%. Sedangkan setelah Program PEMP sistem bagi hasil menjadi rumpon sebesar 25% dan ABK sebesar 75% (kepemilikan bersama). Hal ini menunjukkan program PEMP mampu mendobrak kemiskinan struktural, dengan terjadinya mobilitas vertikal nelayan, yaitu berubah status dari buruh nelayan menjadi pemilik kapal (pengusaha).

Peningkatan pendapatan juga dialami pedagang ikan setelah mendapat penguatan modal. Dengan penguatan modal tersebut, pedagang ikan dapat mengembangkan usaha

melalui penambahan daya tampung pembelian ikan dari nelayan. Namun penguatan modal bagi pembudidaya ikan belum menunjukkan hasil yang signifikan karena usaha budidaya ikan masih baru (merintis) dikembangkan sehingga masih banyak terkendala teknis sehingga belum menghasilkan panen ikan yang diharapkan.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan salah satu konsepsi program Departemen Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2001 yang dirancang secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan., sehingga dapat mendorong dinamika pembangunan sosial ekonomi di kawasan pesisir.

Pendapat dari Cook (1994) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa secara langsung pengaruh pemberdayaan terhadap kesejahteraan tidak signifikan, bermakna bahwa program PEMP yang dikurcurkan belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Tingkat kesejahteraan yang dicapai selama ini lebih dipengaruhi oleh faktor lain terutama modal sosial.²²

Program PEMP hingga saat ini masih terus mencari bentuk ideal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Setidaknya terdapat 2 (dua) elemen penting dalam memperkuat peran PEMP sebagai akselerator peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, yaitu penguatan peran kelembagaan (*institutional strengthening*) pengelola program, dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) lembaga ekonomi mikro. Namun demikian, kedua elemen ini tidak dapat berperan secara optimal dan berkelanjutan jika tidak didukung oleh elemen lainnya, seperti Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP), keterlibatan *stakeholders* dan kemitraan yang dibangun oleh program dengan instansi terkait lainnya.

Sebetulnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir telah mampu memberikan dampak positif terhadap perubahan status ekonomi masyarakat pesisir namun hasilnya belum menunjukkan keberhasilan yang nyata. Beberapa hal yang menjadi penyebab dan sekaligus merupakan penjelasan dari realitas program PEMP di dalam perannya mengentaskan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat pesisir. **Pertama**, berkaitan dengan tingkat kontinuitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang relatif masih rendah.

Kedua, program PEMP yang dilaksanakan di Sekotong baru dapat diterapkan pada kelompok masyarakat nelayan budidaya dan nelayan tangkap dan belum sepenuhnya mampu menyasar sektor lain yang menjadi support atas kesuksesan bantuan yang diberikan. Sehingga sering terjadi kesalahan administrasi maupun teknis yang kemudian hal tersebut menjadi kendala di dalam mencapai tujuan dari program PEMP itu sendiri.

²² Andreas, & Enni Savitri. *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti Dan Rokan Hilir* (Riau: Universitas Riau, 2015), 67

Padahal dengan modal sosial yang dimiliki masyarakat dapat menjadi aset penting dengan hadirnya program PEMP, artinya jika bimbingan dan pelatihan dalam budidaya dan tangkap ikan diberikan, maka seharusnya diiringi juga dengan memberikan pelatihan terkait wirausaha dimasukkan sebagai sub-item ke dalam pelaksanaan program PEMP dan dilaksanakan secara profesional tidak sekedar pemenuhan realisasi alokasi dana sesuai pos anggaran dan lepas tangan, maka program pemberdayaan masyarakat tersebut akan lebih efektif pengaruhnya terhadap perubahan keadaan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik.

Ketiga, rendahnya SDM masyarakat pesisir yang disinyalir merupakan faktor yang bertanggung jawab terhadap kurang optimalnya pelaksanaan PEMP untuk kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dipastikan berdampak pada pengelolaan PEMP yang kurang baik, khususnya pada penanganan program jaring apung, yang masih berlum mapu mengantisipasi siklus musim yang terjadi pada saat proses awal pelepasan benih.

*"pada tahap awal proses pelepasan ikan, kami mengalami kegagalan karena kesalahan dalam memprediksi siklus cuaca, sehingga pada usia dua minggu benih dilepas di karamba terjadi hunan yang membuat air menjadi keruh, sehingga banyak bibit yang telah dilepas menjadi mati"*¹²⁴²³

Hasil Pengabdian ini sejalan dengan pernyataan Saefuddin dkk.(2003), bahwa pemerintah telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan program lainnya yang tujuannya utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, namun secara empiris didapati bahwa pemberdayaan tersebut kurang berhasil. Jebakan kegagalan program terjadi karena implementasi program tidak sesuai dengan konsep yang menjadi referensinya. Artinya sekalipun konsep tersebut baik, aplikasi dilapangan belum tentu menjamin bahwa suatu program pemberdayaan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, sehingga hasilnya belum maksimal. Hal ini diduga bahwa model pemberdayaan yang digunakan belum sesuai dengan obyek yang akan dituju. Sehingga persoalan kemiskinan masih menjadi agenda besar dalam proses pembangunan.

Pendidikan dalam kalangan masyarakat yang diberdayakan masih menjadi faktor penentu dari keberhasilan pemberdayaan. Selain itu karakteristik kelembagaan juga memiliki peran penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan. Sejalan dengan kondisi tersebut maka proses pemberdayaan masyarakat seharusnya memperhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jika tidak, maka tujuan program pemberdayaan itu sendiri tidak dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Sistem nilai dan kelembagaan yang ada dalam masyarakat merupakan modal sosial yang harus ditumbuhkembangkan sebab melalui modal sosial tersebut PEMP sebagai salah satu kebijakan pengembangan wilayah pesisir dapat dilaksanakan dengan pencapaian tujuan yang optimal, yaitu mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat

²³Junaidi (Ketua Kelompok), wawancara di Pengawisan pada tanggal 28 Oktober 2021, jam 11.00 Wita.

pesisir.

Kondisi di mana program pemberdayaan PEMP belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak terjadi pada seluruh kasus terkait kajian pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan, sebab pada kasus yang lain seperti di Jawa Tengah dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia, program pemberdayaan masyarakat telah berhasil memajukan kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan melalui temuan hasil Pengabdian Widiastuti (2006) dengan judul Pengabdiannya "Program PEMP di kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Dan total sampel 67 orang ditemukan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan kedai pesisir sangat bermanfaat bagi masyarakat walaupun pada Solar Pack Dealer untuk Nelayan (SPDN) tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Namun yang terpenting dari hasil Pengabdian tersebut adalah dalam pelaksanaan PEMP akses informasi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kajian yang sama juga menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Hasil studi yang dilakukan oleh Riana Faiza (2004) bahwa dengan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir mampu meningkatkan kesejahteraan yang tinggi bagi nelayan pengolah di Muara Angke. Hamdan (2005), keberhasilan program PEMP ditunjukkan melalui kelembagaan, pembentukan kelompok serta mekanisme perguliran dan penyerapan dana bantuan yang terlaksana dengan baik telah mampu meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat, walaupun untuk keberlanjutan khususnya peguliran dana masih perlu perbaikan karena kendala lambatnya pengembalian pasca program. Kenyataan ini sulit dihindari sebab terkait erat dengan faktor human capital (pendidikan) dan karakteristik kelembagaan yang masih rendah sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam agenda besar pembangunan ke depan, pemerintah sangat perlu memperhatikan beberapa faktor kendala untuk dicari jalan keluarnya.

Selanjutnya hasil studi Meriana (2008) pada keluarga nelayan di Lampung Barat menemukan bahwa melalui pemberian bantuan pinjaman untuk modal usaha telah mampu menaikkan pendapatan masyarakat, selain itu dari keseluruhan responden mengaku bahwa mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya setelah memanfaatkan dana PEMP. Hal ini menandakan bahwa ada efek positif terhadap tingkat kesejahteraan pasca pelaksanaan program PEMP. Pemanfaatan bantuan secara benar dan tepat sasaran sebagai salah satu penentu keberhasilan mereka dalam memperbaiki kondisi kehidupan mereka.

Temuan yang sama oleh Aryansyah (2009) dalam studinya mengemukakan bahwa pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Sukabumi melalui dana bantuan telah mampu menaikkan tingkat pendapatan rata rata perbulan 31,19 persen. Kemudian berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, Siagian (2008) dalam studinya menunjukkan bahwa dampak dari pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan kecamatan dengan kegiatan penyediaan sarana sosial, penyediaan sarana ekonomi, penyediaan lapangan kerja telah berhasil dan berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan.

Belum mampunya program PEMP didalam peran sertanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir, menjadi bahan

evaluasi bagi pelaksanaan program selanjutnya. Namun hal terpenting yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah 2 (dua) hal sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu tingkat kontinuitas (ke-istiqomah-an) kehadiran program yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah serta bimbingan atau pelatihan dasar-dasar pengelolaan lembaga pemberdayaan. Secara lebih profesional kepada individu atau kelompok dari masyarakat pesisir sebelum atau pada saat program PEMP akan dilaksanakan. Sebagaimana juga perlu diperhatikannya sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat.

Keadaan tersebut menandakan bahwa program pemberdayaan EMP belum mampu memberikan kesejahteraan untuk masyarakat, sehingga bisa dipastikan bahwa kesejahteraan yang dicapai masyarakat lebih diperankan oleh faktor modal sosial dan faktor-faktor lain di luar model persamaan kesejahteraan yang diprediksi. Walaupun persepsi masyarakat pesisir memiliki antusias yang tinggi terhadap keberadaan program PEMP di tengah-tengah mereka, namun perlu dipahami juga bahwa umumnya tanggapan masyarakat miskin terhadap program bantuan baik pemerintah ataupun dari non pemerintah untuk mereka selalu dinilai positif.

Penduduk miskin seperti masyarakat pesisir ini, umumnya memiliki keberdayaan ekonomi yang lemah. Hal ini ditandai dengan lemahnya daya beli terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk rumah tangga apalagi untuk usaha. Sehingga kehadiran program pemberdayaan EMP di atas yang sebetulnya diharapkan dapat berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, realitasnya tidak serta merta dapat membantu masyarakat agar bisa keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu implementasi program PEMP. Sebaiknya tidak hanya menerapkan sistem positif yang memperhalikan kemampuan dan profesionalitas masyarakat yang diberdayakan semata sehingga mengenyampingkan faktor modal Sosial yang mereka miliki.

Selain tingkat kontinuitas program PEMP yang relatif masih rendah yang merupakan implikasi bahwa porsi anggaran pemerintah untuk pembiayaan PEMP masih relatif kecil dan ditambah dengan rendahnya SDM masyarakatnya maka ketidakberdayaan ekonomi masyarakat pesisir juga menjadi kendala dan merupakan masalah krusial yang dihadapi pemerintah di dalam mewujudkan tujuan dan program pemberdayaan untuk kesejahteraan. Kompleksitas permasalahan di atas sebagai akibat keterbatasan sumber daya dari kedua belah pihak yaitu pemerintah dan masyarakat, harus dicarikan jalan keluarnya yaitu melalui kebijakan yang lebih partisipatif dengan menitikberatkan pada sistem nilai dan kelembagaan yang bertaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan pertimbangan modal sosial yang dimiliki masyarakat yang juga cenderung semakin berkembang akibat intervensi pemerintah melalui pemberdayaan, maka sekali lagi ditekankan bahwa intervensi pemerintah yang lebih besar khususnya untuk pengalokasian dana pembangunan dalam bidang pemberdayaan masih sangat diperlukan agar masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya sehingga bisa mencapai tingkat kesejahteraan yang sesuai harapan bersama.

Sebetulnya pemberdayaan EMP yang dilaksanakan selama ini telah banyak meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat pesisir, secara statistik telah menunjukkan

angka yang signifikan. Hal ini terungkap dari penuturan responden informan Ramli (Pedagang, 50 tahun) berikut:

".... Dari program ekonomi pesisir, masyarakat bisa memanfaatkan bantuan pemerintah untuk penghidupan yang lebih baik. Oleh karenanya, masyarakat merasa sangat terbantu sekali dengan adanya program itu. Akan tetapi, program semacam ini perlu dilanjutkan di rancang dalam jangka panjang, sehingga hasilnya akan jauh lebih maksimal bagi masyarakat sekotong." ²⁴

Sebagaimana yang telah digambarkan pada bagian yang lalu, bahwa ada tiga tujuan pelaksanaan PEMP, diantaranya:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
3. Mengembangkan keragaman kegiatan usaha, dan memperluas kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

Berdasarkan Pengabdian Pengabdi menunjukkan bahwa salah satu bentuk implementasi program PEMP yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB untuk masyarakat pesisir di Sekotong adalah dalam bentuk pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya tiram mutiara dan budidaya ikan laut dengan sistem Karamba Jaring Apung (KJA) yang secara kuantitatif mengalami peningkatan.

Secara garis besar dapat diuraikan dampak positif dan negative pelaksanaan program PEMP bagi masyarakat sekotong barat;²⁵

- a. Dampak positifnya. Dengan adanya program PEMP baik berupa bantuan teknologi dan bantuan modal budidaya tiram mutiara keuangan masyarakat pesisir semakin baik. Dapat memberi kesempatan luas bagi masyarakat miskin lain dalam mendapatkan program yang sama. Dapat menciptakan lapangan kerja dengan menggunakan sistem yang lebih baik. Adanya kerjasama dan sinergisitas antara anggota kelompok dalam pengolahan dan pemasaran hasil.
- b. Dampak Negatifnya. Dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar kelompok penduduk miskin di pesisir yang belum mendapatkan program bantuan dan atau tidak termasuk sebagai anggota kelompok. Meurunnya daya kreatifitas karena adanya sifat manja dan mengharap bantuan secara terus menerus.

Dampak dari program ini, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budidaya tiram mutiara dan budidaya ikan laut meningkat, sedangkan dari sisi kelembagaan dan keswadayaan masyarakat menunjukkan semakin menguat dengan terbentuknya kelompok

²⁴ Bohari (Ketua Kelompok), wawancara di Gili Gending pada tanggal 29 Oktober 2021, jam 10.00

²⁵ Diolah dari hasil wawancara dengan: Nursimah (Pengawisan); Toni Wijaya (Pengawisan); Salihin (Pengawisan); Junaidi (Pengawisan); Husni Tamrin (Gili Gending); Nursimah (Gili Gending); Mahyun (Gili gending); Kamarudin (Gili gending); Bohari Muslim (Gili gending); yang berlangsung pada tanggal 29-30 Oktober 2021; jam 09.00 Wita.

dan kegiatan pengembangan usaha budidaya.²⁶

Sesuai Hasil wawancara Pengabdi dengan Pak Nursimah selaku ketua kelompok Nelayan menyatakan: “dengan bantuan Program PEMP ini sebagai nelayan kami semakin semangat dalam budidaya tiram mutiara dan hasil budidaya ikan laut kami semakin meningkat dan hasilnya bisa kami rasakan, dengan Program PEMP ini sangat membantu nelayan-nelayan di kelompok kami”

Pengabdi juga mendapatkan informasi Implementasi program Karamba Jaring Apung (KJA) telah meningkatkan hasil panen nelayan, sebagaimana data hasil panen/produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 sebesar 1.089.317 ton, meningkat 65.233 ton dari tahun sebelumnya yakni tahun 2018 sebesar 1.024.084²⁷ hal ini dapat diasumsikan bahwa seiring peningkatan hasil produksi tersebut tentunya juga akan diiringi dengan adanya peningkatan pendapatan nelayan.

Kesimpulan

Pelaksanaan program PEMP yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Sekotong dilakukan dengan berbagai tahapan dari proses awal sampai akhir yakni; 1) Tahap Pertama Perencanaan; 2). Tahap Kedua Pemilihan Lokasi; 3). Tahap Ketiga Sosialisasi Program PEMP; 4). Tahap keempat Pelatihan, pada tahap ini semua kelompok penerima manfaat diberikan pembekalan tergantung pada jenis bantuan yang didapatkan hal ini ditujukan agar ketercapaian manfaat pemberdayaan dapat dimaksimalkan baik dari manfaat untuk peningkatan SDM dan manfaat dari sisi keberlanjutan atas program dan bantuan yang telah didapatkan; 5). Tahap kelima realisasi; pada proses ini adalah tahapan dimana semua jenis bantuan direalisasikan atau diserahkan kepada semua penerima yang telah melalui tahapan seleksi dan pelatihan pengelolaan atas bantuan yang didapatkan. 6). Tahap keenam pendampingan dan monitoring; tahap ini merupakan tahap akhir dari pelaksanaan program PEMP bagi masyarakat pesisir di Sekotong, proses pelaksanaan tujuan ini diarahkan untuk memastikan bahwa bantuan dan pelaksanaan program tidak disalah gunakan oleh oknum maupun kelompok penerima.

Dampak pelaksanaan program PEMP bagi masyarakat penerima memberi dampak positif maupun negatif. Dampak positif program yang dirasakan masyarakat diantaranya: a). Dengan adanya program PEMP baik berupa bantuan teknologi dan bantuan modal budidaya ikan dan tiram mutiara keuangan masyarakat pesisir semakin baik. b). Dapat memberi kesempatan luas bagi masyarakat miskin lain dalam mendapatkan program yang sama. c). Dapat menciptakan lapangan kerja dengan menggunakan sistem yang lebih baik. d). Adanya kerjasama dan sinergisitas antara anggota kelompok dalam pengolahan dan

²⁶ Wawancara dengan: Nursimah (Pengawisan) Anggota Kelompok Mutiara Baru, Wawancara tanggal 29 Oktober 2021; kemudian Lihat data statistik peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dan peningkatan jumlah pendapatan masyarakat pada sektor perikanan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020. <https://bit.ly/2OjFy0c>, akses 31 Maret 2021, Jam, 21.30 Wita.

²⁷ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, *Buku Profil Dinas Perikanan Tahun 2020*, hal. 14

pemasaran hasil. Sedangkan dampak negatifnya. a). Dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar kelompok penduduk miskin di pesisir yang belum mendapatkan program bantuan dan atau tidak termasuk sebagai anggota kelompok. b). Meurunnya daya kreatifitas karena adanya sifat manja dan mengharap bantuan secara terus menerus. Nilai-nilai Islam yang termuat dalam sistem pelaksanaan program PEMP bagi masyarakat Sekotong adalah memberikan pembelajaran bagi kedua belah pihak baik itu pelaksana program (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB) maupun penerima manfaat (Kelompok Mutiara Baru dan Kelompok Harapan Baru) yakni mengajarkan tentang nilai kebaikan, baik dalam niat maupun perbuatan, harus senantiasa bersifat jujur dan amanah baik bagi pelaksana program maupun penerima program kemudian yang terakhir adalah kedua belah pihak harus tetap menepati janji sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah disepakati dalam kontrak pemberian bantuan pada program PEMP bagi masyarakat Sekotong.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Madekhan, *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*, (Yogyakarta: Averroes Press, 2007).
- Andreas, & Enni Savitri. *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti Dan Rokan Hilir* (Riau: Universitas Riau, 2015).
- Andreas, & Enni Savitri. *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti Dan Rokan Hilir* (Riau: Universitas Riau, 2015).
- Bohari (Ketua Kelompok), wawancara di Gili Genting pada tanggal 29 Oktober 2021, jam 10.00 Diolah dari hasil wawancara dengan: Nursimah (Pengawisan); Toni Wijaya (Pengawisan); Salihin (Pengawisan); Junaidi (Pengawisan); Husni Tamrin (Gili Genting); Nursimah (Gili Genting); Mahyun (Gili genting); Kamarudin (Gili genting); Bohari Muslim (Gili genting); yang berlangsung pada tanggal 29-30 Oktober 2021; jam 09.00 Wita.
- Didin S., Damanhuri, *Tinjauan Kritis Ideologi Liberalisme dan Sosialisme*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departement Dalam Negeri, Jakarta, 1997.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, *Buku Profil Dinas Perikanan Tahun 2020*.
- Iin Indarti dan Dwiyadi Surya Wardana, Metode pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan di Wilayah Pesisir Kota Semarang, (BENEFIT: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 17 Nomer 1 – Juni 2013).
- James A. Christenson dan Jerry W. Robinson, Jr Ames. *Community Development In Perspective*: Amerika: Iowa State University Pres, 1989.
- Junaidi (Ketua Kelompok), wawancara di Pengawisan pada tanggal 28 Oktober 2021, jam 11.00 Wita.
- Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Jakarta: LKIS, 2006), h. 23
- Lebih jelasnya lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Lihat data statistik peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dan peningkatan jumlah pendapatan pada masyarakat pada sektor perikanan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020. <https://bit.ly/2OjFy0c>, akses 31 Maret 2021, Jam, 21.30 Wita.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengganggu Bisnis Islam* Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta :LKIS, 2011).
- S. Usman. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Supriyantini Istiqomah, Istiqomah,. (2008) Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam. Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. (Online), Volume 4, Nomor 1, Juni

<http://iain.lampung.ac.id/> Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Akses, 28 November 2021, 14.67 wita.

Tim Penyusun Profil Desa, *Profil Desa Sekotong Barat*, Tahun 2014.

Usman, S. 1995. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wawancara baik Yuli Hidayati, Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTB, pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 09.50 wib

Wawancara Baik Yuli Hidayati, Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTB, pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 09.45 wib

Yang selanjutnya jika merujuk pada penyebutan istilah program hanya akan menuliskan singkatan Program PEMP saja; hal ini ditujukan untuk memudahkan dalam penggambaran dan konsistensi penulisan.

Yusuf Qardawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam II*/ Yusuf Qardawi; penerjemah, Abdul Salam Masykur; editor, Ratna Susanti. (Surakarta, Era Intermedia, 2003).